

PENJELASAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI**

TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Identifikasi Masalah
- Tujuan Penyusunan
- Dasar Hukum

II. POKOK PIKIRAN

III. MATERI MUATAN

- Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- Ruang Lingkup Materi

IV. Pokok Pikiran

V. Penutup

- Kesimpulan
- Saran

KATA PENGANTAR

Pedoman penyusunan APBNagari merupakan langkah awal bagi pemerintah nagari dalam menyusun APBNagari yang menjadi acuan bagi pemerintah nagari untuk mensinkronkan program dan kegiatan nagari dengan program yang ada pada RPJMD pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pedoman penyusunan APB Nagari merupakan acuan bagi pemerintah nagari dalam menyusun APBNagari tahun 2025, maka dari itu di buatlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari. Dalam Peraturan Bupati tersebut berisi tentang :

- Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah nagari
- Prinsip penyusunan APB Nagari
- Kebijakan penyusunan APBNagari
- Teknis penyusunan APBNagari
- Teknis evaluasi rancangan APBNagari
- Perubahan APNNagari
- Hal-hal khusus lainnya

II. Identifikasi Masalah

Pedoman penyusunan APBNagari pada umumnya sangat penting dalam rangka penyusunan APBNagari karena dalam Peraturan Bupati mengatur tentang sinkronisasi antara program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari, namun pada kenyataannya masih banyak kegiatan yang ada pada nagari tidak sejalan dengan program yang ada di kabupaten.

III. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan dari pedoman penyusunan APBNagari yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari selama 1 (satu) tahun anggaran.

IV. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam pemberian penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan kedudukan Bamus Nagari adalah :

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa
- Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 2 tahun 2016 tentang Nagari

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Penyusunan APBNagari sebagai acuan bagi pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari selama satu tahun anggaran .

Maka dari itu dalam pelaksanaannya nagari dapat menyesuaikan program dan kegiatan dengan program yang ada di Pemerintah Daerah .

BAB III

MATERI MUATAN

I. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan kemudahan kepada Pemerintah Nagari untuk menyusun APB Nagari selama satu tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersebut .

II. Ruang Lingkup Materi

- Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Nagari
- Prinsip penyusunan APBNagari
- Kebijakan penyusunan APBNagari
- Teknis penyusunan APBNagari
- Teknis evaluasi rancangan APBNagari
- Perubahan APBNagari
- Hal-hal khusus lainnya

BAB IV
PENUTUP

I. Kesimpulan

Dalam rangka penetapan pedoman penyusunan APBNagari, perlu adanya aturan yang mengatur untuk di DPMDPPKB membuat Peraturan Bupati terkait acuan bagi pemerintah nagari dalam menyusun APBNagari satu tahun anggaran. Untuk itu perlu kiranya Peraturan Bupati di percepat untuk di sahkan.

II. Saran

- Agar Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBNagari dapat segera ditetapkan sebagai regulasi bagi Pemerintahan Nagari.
- Perlu dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati tersebut pada Pemerintahan Nagari

Kepala DPMDPPKB



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19780215 199802 1 001